

ABMISIBIL, Riwayatmu Kini.....

Oleh SKP Keuskupan Jayapura

Berikut ini adalah rangkuman hasil lokakarya pastoral Paroki Bintang Timur Abmisibil tgl. 18-22 Oktober 2004. Lokakarya ini difasilitasi oleh SKP Keuskupan Jayapura atas undangan P. Mick Tekege pr, Pastor Paroki Abmisibil, yang bekerjasama dengan Kelompok Peduli Masyarakat Okbibab (KPMO) di bawah komando Bpk. Sipri Nalsa dan Bpk. Anton Kasipdana. Hal serupa telah dilakukan di Paroki Iwur dan hasilnya (yang berupa data dan analisis masalah) telah diserahkan kembali kepada Pastor dan Umat Iwur untuk menjadi bahan pegangan bagi paroki untuk menyusun program tahunan paroki sekaligus bahan *lobby* kepada DPRD baru dan Pemerintah Kabupaten baru Pegunungan Bintang.



1. Masalah pendidikan



Masalah-masalah pembangunan gedung SD YPPK Abmisibil dan SD Negeri Oksemar adalah contoh buruknya kendali pemerintah terhadap penggelapan anggaran oleh pemborong dan pejabat yang terkait. Satu unit bagian dari SD YPPK sudah tinggal pondasi saja sementara 1 unit lain roboh diterjang angin (lihat foto) padahal belum ada dinding dan pemborong sudah

meninggalkan tempat. Keadaan ini sudah dilaporkan kepada Delpen dan Dinas P dan P Jayawijaya tahun lalu. Bpk. Bernard Ningdana selaku kepala sekolah melaporkan bahwa pihak Bawasda telah beberapa kali melakukan inspeksi ke lokasi pada 2003 tetapi tidak ada satu tindakan penanganan. Hal yang sama dilakukan oleh salah seorang anggota DPRD Jayawijaya yang melakukan kunjungan kilat sekitar 20 menit.

Adapun SDN Oksemar memang dalam keadaan rusak berat (lihat foto) dan guru-guru setempat melaporkan bahwa Pemkab Pegunungan Bintang telah mengucurkan dana untuk pembangunan yang ditangani oleh Kepala Distrik bersama CV Modana-Jayapura. Sekitar 20 orang telah bekerja untuk mengangkut pasir hingga 5 kubik tetapi ongkos kerja dan harga pasir belum juga dibayar. Masyarakat dan guru-guru kuatir bahwa ini akan berkepanjangan. Di SD ini ada 4 guru ber-SKP dan 1 penjaga



sekolah yang terpaksa mengajar. Salah seorang guru sedang dalam tahanan polsek karena membunuh istrinya sendiri.



Sementara itu SMP Negeri Okbibab juga dalam keadaan rusak parah (lihat foto). Lebih dari itu dua guru ber-SK dan 1 tenaga TU (tata usaha). Karena itu ada 5 orang tenaga sukarela yang menyumbangkan tenaga dan waktunya untuk mengajar 220 siswa yang terbagi dalam 5 kelas. Tenaga sukarela ini dibayar Rp. 100.000/ bulan yang diambil dari

dana BP3 dan dibayarkan setiap triwulan tetapi tidak lancar.

SMA Okbibab masih berdiri tetapi mengalami kemunduran juga. Empat tahun lalu diselenggarakan belajar malam bagi semua siswa karena sekolah menyediakan listrik setiap malam. Akan tetapi, sekarang belajar malam dilakukan satu semester sekali menjelang ujian semesteran. Guru-guru yang tersedia juga amat kurang.

2. Masalah kesehatan



Bidang layanan kesehatan masyarakat merupakan segi buruk lain dari Distrik Okbibab. Langkah SKP bersama para perawat dan tenaga kesehatan di Distrik ini untuk mengadakan tindakan mantan Kepala Puskesmas yang menggelapkan gaji dan honor tenaga kesehatan berbuah pada pemecatan ybs sebagai kepala puskesmas tetapi tetap sebagai pegawai puskesmas. Kini yang bersangkutan ambil

tindakan merusak dengan menjual inventaris puskesmas demi kepentingan sendiri, seperti accu, solar sel, ATK lain. Hal ini sudah dilaporkan ke Polsek tetapi instansi ini mengatakan bahwa hal ini perlu dilaporkan lebih dulu kepada Dinas Kesehatan Kabupaten. Celaknya Kepala Dinas yang ada masih merangkap sebagai Asisten I Pjs Bupati sehingga tidak ada perhatian untuk tangani masalah semacam ini. Ikatan perawat Okbibab telah secara resmi melayangkan surat kepada Kepala dinas ini agar melepaskan jabatan rangkap dan memberikan kepada Mantri Darius Salamuk di Oksibil yang memang terkenal sebagai mantri jujur, terampil, dan berjiwa pelayanan. Usulan ini belum ditanggapi juga.

3. Masalah pelayanan gereja

Dari lokakarya jelas terungkap bahwa banyak kebutuhan pelayanan yang dapat menjadi bidang pelayanan delegat atau komisi. Secara jelas diungkapkan kebutuhan pembinaan pewarta yang sekarang merosot dibandingkan di era pastor Willem Sinawil. Kebutuhan pembinaan ibu-ibu dari segi ketrampilan perempuan seperti menjahit, penyuluhan gizi, ketrampilan memasak dan sejenisnya. Kebutuhan akan pembinaan guru-

guru agama juga dirasa terbengkalai. Kebutuhan akan pembinaan simpan pinjam kios kampung dan kios pemuda secara jelas diungkapkan. Apakah masalah-masalah ini tinggal berlalu saja?

4. Masalah keamanan

Tentara dan polisi memang tidak lagi sekasar tahun 1999 dan sebelumnya. Satuan tentara yang bertugas adalah Yonif 310 KK Siliwangi dan Koramil. Sekarang mereka lebih terkontrol meski tidak berarti bahwa mereka patut diacungi jempol dari segi profesionalitas sebagai aparat pertahanan dan aparat penegak hukum. Kedua institusi tetap merupakan salah satu sumber gangguan kamtibmas yang berpengaruh nyata di masyarakat antara lain dalam tindakan mereka dengan memacari gadis-gadis setempat sekadar sebagai kesenangan karena yang bersangkutan telah beristri atau calon istri di tempat lain. Gadis-gadis ini bukannya tidak tahu tetapi mereka tetap berkeras untuk selalu pergi ke tangsi-tangsi tentara dan polisi meski orang tua mereka melarang. Masalah ini khas Abmisibil dan tetap belum menemukan pemecahan.

5. Masalah dugaan korupsi



Masalah ini makin menyakiti hati dan kondisi kehidupan masyarakat Okbibab khususnya dan Pegunungan Bintang pada umumnya. Dengan mata telanjang, masyarakat Okbibab terpaksa harus membeli beras raskin di rumah kepala distrik seharga Rp. 12.000/ liter padahal seharusnya Rp. 1.500,- menurut ketentuan. Itupun jika ditimbang ternyata beratnya hanya $\frac{1}{4}$ liter menurut pengakuan

kepala-kepala kampung. Beras raskin didrop setiap tiga bulan dan berjumlah 10 ton per distrik. Kepala distrik memutuskan bahwa 6 ton dibagi kepada masyarakat dan 4 ton dijual dengan harga seperti disebut di atas. Hal ini telah berlangsung hampir setahun sejak Kepala Distrik Markus Urpon dilantik pertengahan 2003.

Kepala-kepala kampung tertua datang kepada SKP dan menceritakan bahwa honor mereka sebesar Rp. 1,5 juta per triwulan plus honor LMD sebesar Rp. 450.000,- dipotong Rp. 200.000,- oleh kepala distrik tanpa alasan. Kepala kampung ini umumnya telah bekerja selama 30 tahun dan selalu taat pada perintah atasan apapun isinya. Tidak ada SK mengenai honor yang mereka terima karena mereka pegang pada pernyataan lisan Pjs. Bupati yang mengatakan bahwa honor mereka Rp. 1,5 juta per triwulan.

Kepala-kepala kampung juga melaporkan dugaan penggelapan dana pesta peresmian kantor distrik tgl. 17 Agustus 2004 dimana 61 ekor babi masyarakat dikorbankan dan dijanjikan pembayaran sebesar Rp. 250 juta. Hingga kini kepala distrik tidak juga menunjukkan tanda akan membayar utangnya dan bahkan selalu menghindari pertemuan dengan kepala kampung ybs. Jumlah tersebut tidak termasuk 15 ekor babi yang merupakan sumbangan wajib dari 15 kepala kampung di Distrik Okbibab untuk pesta peresmian tersebut.

Kasus lain yang secara jelas diungkap adalah pemotongan uang Bandes oleh Kepala Distrik yang diterima sekali setahun dan senilai Rp. 10 juta. Pemotongan sebesar Rp. 1 juta dan dilakukan tanpa ada dasar hukum yang jelas. Sayangnya, tidak ada bukti apapun atau pegangan apapun mengenai jumlah Bandes yang sebenarnya.

6. Masalah pemerintahan



Pemekaran kabupaten baru dan pemilihan bupati langsung di tahun 2005 menjadi masalah yang menggelisahkan masyarakat Okbibab. Mereka alami bahwa Pjs. Bupati Wellington Wenda tidak mendengarkan mereka dan tengah menggalang kekuatan agar mendapat dukungan dari masyarakat. Karena itu dengan penuh semangat masyarakat mengikuti diskusi pemilihan bupati langsung berdasarkan draft UU Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) yang sudah disahkan oleh DPR-RI tetapi belum ditandatangani oleh Presiden sehingga belum mendapatkan nomor resmi.

Jelas masyarakat bingung dengan segala proses politik yang ada dan tidak ada satu pihakpun yang memberikan penjelasan terbuka dan sederhana. Penjelasan ini sangat mendesak dilakukan agar masyarakat mampu menggunakan hak pilihnya berdasarkan informasi yang tepat dan lengkap.
